

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

NOMOR :

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEKERJAAN UMUM

1. Nama Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum
2. Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum
3. Fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan, bidang perencanaan teknis; bina marga; pengairan; bangunan dan penyehatan lingkungan; bidang alat berat dan laboratorium; Kelompok Jabatan Fungsional dan unit kerja lainnya dilingkungan Dinas;
 - d. penerbitan izin/rekomendasi di bidang bangunan gedung dan jasa konstruksi;
 - e. pengendalian dan pengawasan pasca penerbitan izin/rekomendasi di bidang bangunan gedung dan jasa konstruksi;
 - f. pembinaan administrasi di lingkungan Dinas;
 - g. pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
 - h. pelaksanaan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum;
 - i. penerbitan rekomendasi untuk usulan penetapan status jalan desa dari pemerintah desa kepada Bupati;
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - k. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
 - m. pelaporan hasil pelaksanaan tugas;

Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang	$\text{SPM Kondisi Jalan} = \frac{\sum^{\text{akhir tahun pencapaian SPM}} \text{Panjang jalan memenuhi kriteria kondisi jalan}}{\sum^{\text{Seluruh PK}} \text{Panjang Jalan Penghubung PK}}$	Inventaris Jalan PU
2	Meningkatnya infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk konservasi, pendayagunaan sumberdaya air, serta pengendalian daya rusak air	Tingkat kondisi baik jaringan irigasi di daerah irigasi kewenangan kabupaten	62%	Data Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5
3	Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman	<p>Cakupan layanan air minum perdesaan</p> <p>cakupan pelayanan air minum perkotaan</p> <p>cakupan pelayanan air limbah domestik</p> <p>Tersedianya Pelayanan Jaringan Drainase Skala Kawasan dan Skala Kota</p> <p>Pengurangan Luas Genangan</p> <p>Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di kab/kota</p> <p>Cakupan Pelayanan Informasi Jasa Konstruksi</p> <p>cakupan pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)</p>	<p>SPM Air Minum = $\frac{\sum \text{Masyarakat Yang memiliki Akses Air Minum Yang Aman}}{\sum \text{Jumlah Penduduk Desa Pada Akhir Tahun Pencapaian SPM}}$</p> <p>SPM Air Minum = $\frac{\sum \text{Masyarakat Yang memiliki Akses Air Minum Yang Aman}}{\sum \text{Jumlah Penduduk Kabupaten Pada Akhir Tahun Pencapaian SPM}}$</p> <p>SPM Air Limbah = $\frac{\sum \text{jumlah akumulatif masyarakat memiliki akses/teknis sistem jaringan pengolahan limbah komunal di kawasan/kab/kota}}{\sum \text{jumlah akumulatif tingkat keptikan di seluruh masyarakat kab/kota}}$</p> <p>$= \frac{\text{Jumlah penduduk yang terlayani sistem drainase}}{\text{Jumlah penduduk seluruh kota}} \times 100\%$</p> <p>SPM Luas Genangan = $\frac{\sum \text{Luasan Daerah Bebas Genangan}}{\sum \text{Luas Daerah Rawan Genangan}}$</p> <p>Σ Biaya maksimum per m2 pelaksanaan konstruksi untuk pembangunan bangunan gedung negara</p> <p>Rata - Rata Nilai Layanan Dasar SIPJAKI Tingkat Kabupaten</p> <p>$= \frac{\text{Jumlah Permohonan IUJK yang Diterbitkan Paling Lama 10 Hari Kerja Setelah Persyaratan Lengkap}}{\text{Jumlah Seluruh Permohonan IUJK yang Persyaratannya Dinyatakan Lengkap}} \times 100\%$</p>	

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM



Ir. Lukman Sudrajat
Pembina Utama Muda